

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perubahan perilaku pemilih pada Pilkada Kota Depok 2024, dapat disimpulkan bahwa kemenangan pasangan Supian Suri–Chandra Rahmansyah merupakan manifestasi dari perubahan mendasar dalam cara masyarakat Kota Depok memaknai kontestasi politik lokal. Perubahan perilaku pemilih tidak sekadar menunjukkan pergeseran preferensi elektoral, melainkan mencerminkan transformasi orientasi politik masyarakat dari pola loyalitas jangka panjang terhadap partai menuju pola pilihan yang lebih reflektif, rasional, dan berbasis evaluasi terhadap figur kepemimpinan.

Selama periode kepemimpinan yang panjang, dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membentuk stabilitas politik lokal di Kota Depok. Namun, hasil Pilkada 2024 memperlihatkan bahwa stabilitas tersebut tidak identik dengan kepuasan politik masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pemilih tidak serta-merta menolak atau meninggalkan PKS sebagai kekuatan politik, tetapi mulai membedakan secara tegas antara dukungan terhadap partai politik dan penilaian terhadap figur kepala daerah. Pemisahan ini menunjukkan adanya kesadaran politik yang semakin matang, di mana pemilih memposisikan Pilkada sebagai arena evaluasi kepemimpinan eksekutif, bukan sekadar reproduksi kekuatan partai.

Perubahan perilaku pemilih di Kota Depok juga ditandai oleh menguatnya orientasi rasional dan evaluatif dalam pengambilan keputusan politik. Pemilih menilai calon kepala daerah berdasarkan rekam jejak, kapasitas manajerial, serta kemampuan dalam merespons persoalan-persoalan konkret yang dirasakan masyarakat, seperti pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan arah pembangunan kota. Dalam konteks ini, pilihan politik menjadi sarana ekspresi kritik yang relatif damai terhadap kepemimpinan sebelumnya, sekaligus harapan terhadap munculnya gaya kepemimpinan yang lebih adaptif dan responsif.

Selain faktor rasional, penelitian ini menegaskan pentingnya dimensi psikologis dalam perilaku memilih. Supian Suri dipersepsikan sebagai figur yang merepresentasikan stabilitas birokrasi sekaligus perubahan gaya kepemimpinan. Persepsi terhadap figur calon, termasuk citra sebagai pemimpin yang komunikatif

dan dekat dengan masyarakat, berkontribusi dalam membentuk kepercayaan publik. Kepercayaan ini menjadi modal politik yang signifikan, terutama di tengah kejenuhan sebagian pemilih terhadap pola kepemimpinan yang dianggap stagnan. Dengan demikian, perubahan dukungan politik tidak semata-mata digerakkan oleh program dan visi formal, tetapi juga oleh persepsi emosional dan simbolik terhadap figur kepemimpinan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya partisipasi politik masyarakat, khususnya dari kalangan pemilih muda, turut mempercepat perubahan perilaku pemilih di Kota Depok. Pemilih generasi milenial dan Gen-Z memiliki kecenderungan untuk bersikap lebih independen, tidak terikat secara ideologis, serta aktif dalam mengakses dan memproduksi informasi politik melalui media sosial. Media sosial berfungsi tidak hanya sebagai alat kampanye, tetapi juga sebagai ruang deliberasi informal yang membentuk opini publik, memperkuat persepsi terhadap figur calon, serta memengaruhi penilaian terhadap kinerja dan kredibilitas kandidat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika perilaku pemilih perkotaan semakin dipengaruhi oleh interaksi antara politik elektoral dan ekosistem komunikasi digital.

Secara keseluruhan, perubahan perilaku pemilih pada Pilkada Kota Depok 2024 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, rasional, dan psikologis. Dominasi politik jangka panjang tidak lagi menjadi penentu tunggal dalam kontestasi Pilkada, melainkan berhadapan dengan pemilih yang semakin kritis dan selektif. Temuan ini menegaskan bahwa perilaku pemilih di Kota Depok tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan loyalitas partai, tetapi harus dilihat sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh evaluasi kepemimpinan, persepsi figur, serta konteks sosial-politik yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perubahan perilaku pemilih di tingkat lokal, khususnya di wilayah perkotaan dengan sejarah dominasi politik yang kuat. Studi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku pemilih tidak selalu menandakan pergeseran ideologi, melainkan dapat menjadi bentuk ekspresi rasional masyarakat dalam merespons stagnasi kepemimpinan dan tuntutan perubahan. Kesimpulan ini memperkaya kajian perilaku pemilih dengan menegaskan bahwa Pilkada merupakan arena

strategis bagi masyarakat untuk menilai dan mengoreksi arah kepemimpinan daerah secara demokratis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aktor-aktor politik lokal serta bagi pengembangan kajian akademik mengenai perilaku pemilih di tingkat daerah.

5.2.1 Saran bagi Partai Politik

Partai politik, khususnya partai yang selama ini memiliki dominasi politik jangka panjang di Kota Depok, perlu melakukan evaluasi internal secara lebih mendalam terhadap pola kepemimpinan, strategi elektoral, dan pendekatan komunikasi politik yang digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas pemilih tidak lagi bersifat absolut, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, partai politik tidak dapat semata-mata mengandalkan kekuatan struktural, jaringan organisasi, maupun basis pemilih tradisional untuk mempertahankan kemenangan politik.

Partai politik perlu mulai memandang Pilkada sebagai ruang kompetisi figur dan kepemimpinan, bukan hanya sebagai perpanjangan dari kekuatan partai di tingkat legislatif. Hal ini menuntut partai untuk lebih selektif dalam proses kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah, dengan menekankan pada kapasitas kepemimpinan, rekam jejak birokrasi atau sosial, serta kemampuan membangun kepercayaan publik. Selain itu, partai juga perlu meningkatkan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat perkotaan yang semakin rasional dan kritis, sehingga kebijakan dan narasi politik yang dibangun tidak terkesan stagnan atau terputus dari realitas sosial yang berkembang.

5.2.2 Saran bagi Kandidat dan Tim Kampanye

Bagi kandidat kepala daerah dan tim kampanye, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya membangun strategi politik yang berorientasi pada kepercayaan publik dan kedekatan substantif dengan masyarakat. Kandidat tidak lagi cukup mengandalkan dukungan partai atau simbol-simbol politik formal, melainkan perlu menunjukkan kapasitas kepemimpinan melalui rekam jejak

yang jelas, gagasan yang relevan, serta sikap yang responsif terhadap isu-isu lokal yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tim kampanye juga perlu memanfaatkan media sosial secara lebih strategis dan bertanggung jawab. Media sosial seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai alat mobilisasi suara atau penyebaran citra semu, tetapi sebagai ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan dialog, klarifikasi, dan penyampaian gagasan secara terbuka. Narasi perubahan yang dibangun oleh kandidat perlu diiringi dengan konsistensi pesan dan tindakan, sehingga tidak berhenti pada janji elektoral semata, melainkan mampu membangun persepsi kepemimpinan yang kredibel dan berkelanjutan di mata pemilih.

5.2.3 Saran bagi Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah

Bagi penyelenggara pemilu, penelitian ini menunjukkan pentingnya menciptakan iklim kontestasi politik yang adil, transparan, dan kompetitif, terutama di wilayah yang memiliki sejarah dominasi politik tertentu. Penyelenggara pemilu diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga kualitas demokrasi lokal melalui pengawasan yang ketat terhadap praktik kampanye, distribusi informasi politik, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu menjadikan hasil Pilkada sebagai refleksi terhadap kebutuhan masyarakat akan kepemimpinan yang lebih responsif dan adaptif. Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan publik yang sejalan dengan aspirasi pemilih, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, perubahan perilaku pemilih yang terjadi dalam Pilkada tidak berhenti sebagai fenomena elektoral semata, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif.

5.2.4 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup maupun pendekatan metodologis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan membandingkan perubahan perilaku pemilih di Kota Depok dengan daerah lain yang memiliki karakteristik

politik serupa, khususnya wilayah perkotaan dengan dominasi partai politik dalam jangka waktu yang panjang.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti penggunaan metode kuantitatif atau pendekatan campuran (*mixed methods*), guna mengukur secara lebih komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku pemilih. Kajian yang lebih mendalam mengenai peran media sosial, psikologi politik pemilih muda, serta fenomena pemisahan pilihan antara legislatif dan eksekutif juga penting dilakukan untuk memperkaya literatur mengenai perilaku pemilih dalam konteks demokrasi lokal Indonesia.

